

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an, tetapi beberapa perusahaan sudah lama melakukan aktivitas sosial perusahaan yang mendekati konsep CSR. Apabila kita mendengar konsep CSR, maka akan timbul berbagai persepsi seperti CSR hanya berfokus pada bidang sosial saja atau aktivitas lingkungan tanpa memperdulikan situasi sosialnya dan masih banyak persepsi yang memandang CSR secara dangkal, dalam memahami CSR tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk uang tunai. Dewasa ini, banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karikatif semacam itu, karena tidak dapat meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sumber daya alam, serta sumber daya ekonomi. Sehingga perusahaan harus dapat memahami dan melaksanakan program CSR agar dapat membangun lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan CSR akan berpengaruh pada semua aspek operasi perusahaan. Sehingga konsep utama CSR adalah memperhatikan dan melibatkan *shareholder*, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan *stakeholder* lainnya. Menurut Suharto (2010, hlm. 4), kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dijadikan indikator dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan.

Menurut Elkington (1997) dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga memiliki

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Menurut Suharto (2010, hlm. 20) peraturan tentang CSR relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti yang kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang dapat digunakan untuk PKBL.

Sejak disahkan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membuat CSR di Indonesia semakin kuat. Hal ini disebabkan, UU tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah, "PT yang menjalankan usaha di bidang dan/ atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan" (Pasal 74 ayat 1). Peraturan lain yang berhubungan dengan CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam UU ini telah juga mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau badan perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34). Dunia bisnis harus mencerminkan etika yang baik untuk menjadi patokan dalam membimbing dan mengarahkan anggotanya untuk mematuhi aturan serta menjamin kegiatan bisnis agar dapat berjalan dengan seimbang,

Kartini, (2013 hlm 54) menyatakan agar sebuah strategi dapat tercapai dalam implementasi CSR memerlukan indikator yang efektif dan bersifat kualitatif salah satunya adalah keberlanjutan, dimana terjadinya alih-peran dari perusahaan ke masyarakat, masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan memelihara program dengan baik, program bisa tetap dijalankan tanpa keikutsertaan perusahaan serta memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis. Peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap perusahaan. Oleh karena itu, program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan CSRNya.

Pada dasarnya pembangunan yang diselenggarakan harus dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya, belum semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, diantaranya kemiskinan. Dalam empat tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Indonesia secara bertahap mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Tempat Tinggal, 2014-2017.

| Tahun     | Jumlah Penduduk Miskin<br>(Juta Orang) |       |           | Persentase Penduduk Miskin |       |           | Garis kemiskinan<br>(Rp/Kapita/Bulan) |         |
|-----------|--|-------|-----------|----------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|---------|
|           | Kota                                   | Desa  | Kota+Desa | Kota                       | Desa  | Kota+Desa | Kota                                  | Desa    |
| Mar 2014  | 10.51                                  | 17.77 | 28.28     | 8.34                       | 14.17 | 11.25     | 318.514                               | 286.097 |
| Sept 2014 | 10.36                                  | 17.37 | 27.73     | 8.16                       | 13.76 | 10.96     | 326.853                               | 296.681 |
| Mar 2015  | 10.65                                  | 17.94 | 28.59     | 8.29                       | 14.21 | 11.22     | 342.541                               | 317.881 |
| Sept 2015 | 10.62                                  | 17.89 | 28.51     | 8.22                       | 14.09 | 11.13     | 356.378                               | 333.034 |
| Mar 2016  | 10.34                                  | 17.67 | 28.01     | 7.79                       | 14.11 | 10.86     | 364.527                               | 343.647 |
| Sept 2016 | 10.49                                  | 17.28 | 27.76     | 7.73                       | 13.96 | 10.70     | 372.114                               | 350.420 |
| Mar 2017  | 10,67                                  | 17.10 | 27.77     | 7.72                       | 13.93 | 10.64     | 385.621                               | 361.496 |

Sumber: BPS 2017

Pada maret 2014 persentase penduduk miskin sebesar 11,25%, persentase penduduk miskin menurun 0,61% dibandingkan maret 2017 dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,64% (Badan Pusat Statistik Indonesia). Penduduk miskin di Indonesia sempat mengalami kenaikan dari segi jumlah sebesar 0,86 juta jiwa dan persentase sebesar 0,26% pada tahun 2015. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan berhasil ditekan dan selaras dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang 0,51 juta jiwa dibandingkan tahun 2014.

Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi tiga masalah besar, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Ketiga hal tersebut menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan, menurut Hanif. Dalam hal ini Hanif (Tempo.CO, Jakarta, 2017) menyatakan

Kenapa orang miskin, karena tak mampu mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Kenapa tidak bisa bekerja dengan gaji besar, karena SDM (sumber daya manusia) tenaga kerja Indonesia 60 persen lulusan SD-SMP sehingga kompetensinya rendah. Kenapa hanya lulus SD-SMP, karena miskin sehingga tak mampu bersekolah hingga perguruan tinggi. Kenapa terjadi ketimpangan (penghasilan), karena ada ketimpangan kompetensi.

Dengan adanya bantuan dari perusahaan dalam merancang program CSR diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat yang menerima program. Prayogo dan Hilarius (2012) mengemukakan bahwa peran antara korporasi dan pemerintah tentu berbeda dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang kompleks. Harus ditegaskan bahwa aktor utama dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan adalah pemerintah, sedangkan korporasi turut berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan batasan ini maka tingkat keberhasilan peran korporasi harus dilihat dalam indikator mikro, yaitu melihat proses program pengentasan dan hasil program, melihat pengalaman obyektif dan persepsi subyektif kelompok penerima program dan non penerima atau elevator program. Maka ukuran tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan difokuskan secara proporsional dengan cakupan tanggung jawab dan kewajiban korporasi, dalam berpartisipasi di desa tujuan.

Salah satu perusahaan yang turut serta dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan adalah PT. ANTAM. PT. ANTAM (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, batu bara dan jasa pemurnian logam mulia. Perusahaan telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sejalan dengan salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat sesuai dengan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN. PKBL PT.ANTAM diutamakan untuk wilayah di sekitar kegiatan operasi perusahaan dengan melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha kecil masyarakat agar mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan

pemberdayaan (Laporan PKBL 2016). Namun pada kenyataannya saat pelaksanaan PKBL oleh perusahaan masih di temukan beberapa oknum yang mengambil keuntungan dari penyaluran dana CSR tersebut.

Ketertarikan penelitian ini diawali dari adanya kasus korupsi dana CSR yang dilakukan oleh Senior Manager Post Mining Antam, Ibrahim dan mantan Asisten Senior Manager Suatmaji serta mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Edy Yuwono selaku ketua pelaksanaan CSR. Unsoed sebagai badan layanan umum menerima Rp 5,85 miliar dana CSR dari Antam pada 2011 untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan bekas tambang di Desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Purworejo. Tetapi dalam perjanjian itu menerangkan bahwa Edy sebagai Ketua Yayasan Bina Insani. Terungkap bahwa dana CSR Antam sekitar Rp 759 juta yang sudah diserahkan kepada Tim Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, mengalir ke rekening pribadi Suatmaji. Dana tersebut mengalir dalam tiga tahap, seiring tahapan pencairan dana CSR dari Antam ke Unsoed. Pertama, Suatmaji menerima Rp 315 juta, kedua Rp 120 juta, dan ketiga Rp 324 juta. Dalam hal ini Suatmaji di hadapan majelis hakim menyatakan uang yang diterimanya adalah untuk pembiayaan proposal dari lembaga yang menerima dana CSR, dan fee manajemen. Jika Unsoed tidak mau menerima, maka dana akan dialihkan ke lembaga lain. Menurut Suatmaji, Tim Unsoed yang mengirim dana ke rekeningnya adalah dosen Fakultas Peternakan Unsoed, Winarto Hadi. Dia menerangkan, sebagian dari dana yang dikirimkan Winarto itu untuk biaya sewa rumah (Suara Merdeka, 2014).

Berbeda dengan penggunaan dana CSR di Jawa Barat, menurut Staff CSR Antam Site Pongkor Agus Setiono PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk telah merealisasikan dana CSR tahun 2014 sebesar Rp 8,34 miliar untuk kawasan Pongkor, Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Realisasi dana CSR pada saat itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana sebesar Rp 8,34 miliar tersebut didistribusikan ke beberapa program, seperti program kemitraan sebesar Rp 2,89 miliar, community development sebesar Rp 3,67 miliar, dan dana bina lingkungan sebesar Rp 1,77 miliar. Semua dana CSR yang diterima dari PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk digunakan sesuai dengan program yang ada (Metrotvnews.com, Bogor, 2015).

Peneliti memilih PT.ANTAM yang beroperasi di Dusun Piasak, Kecamatan Tayan Hilir. Alasannya, karena peneliti juga tinggal di wilayah yang masuk dalam operasi perusahaan serta merasakan dampak yang di berikan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. PT ANTAM UBP Bauksit Tayan Hilir, melaksanakan program CSR di tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau yang ada di Kabupaten Sanggau meliputi tiga bidang utama yaitu pendidikan berupa beasiswa dan bantuan dalam melaksanakan paket B, kesehatan berupa bantuan alat kesehatan dan makanan tambahan untuk bayi dan lansia dan ekonomi berupa pelatihan dan bimbingan keterampilan, serta satu bidang tambahan yaitu sosial budaya yang berupa bantuan dana untuk kegiatan adat-istiadat dan pembangunan rumah ibadah. Untuk program yang sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat yaitu bidang ekonomi dengan pembentukan kelompok tani. Pada awalnya pembentukan kelompok tani didasari oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Pak Tereng yang melihat bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan selain menjadi petani karet dan karena sebagian besar masyarakat, sekitar 80% telah menyerahkan tanahnya ke perusahaan untuk pembebasan lahan.

Kelompok tani yang dibentuk oleh perusahaan di Dusun Natai Desa Balai Belungai Kecamatan Toba berawal dari keberadaan kelompok ibu-ibu PKK. Dimulai dengan penanaman bibit arachis dan ladon, mereka dilatih dan dibimbing oleh tim dari perusahaan, dengan beranggotakan 12 orang pada tahun 2014 dan bertambah hingga pada tahun 2017 sudah berjumlah 42 orang dengan omset kurang lebih sebesar setengah milyar per tahun, dan saat ini kelompok tani tersebut masih dalam mitra binaan PT.ANTAM, karena kontrak mereka belum mencapai 100.000 bibit untuk sekali kontraknya. Hasil tanaman yang di hasilkan oleh kelompok tani juga digunakan untuk program penanaman kembali lahan pasca tambang oleh perusahaan.

Dengan adanya bantuan dari perusahaan tersebut, masyarakat yang dulunya hanya bergantung pada pertanian karet di kebun sendiri dan yang akan terganggu dengan musim hujan yang menyebabkan kurangnya pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 2014 harga karet sempat menurun dengan kisaran harga Rp 7.000-Rp 8.000, sedangkan harga beras perkilo

adalah Rp 10.500- Rp 15.000 dan harga gula Rp 13.000- Rp 15.000 perkilo (Tribunnews.com, 2014) Namun sekarang sudah mulai beralih ke kelompok tani yang di selenggarakan oleh perusahaan. Di dalam kelompok tani mereka dibimbing dan diberikan keterampilan pembibitan dan penanaman oleh perusahaan tersebut agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pendapat yang pro dengan adanya program dari perusahaan dikemukakan oleh Pak Hardi. Dalam hal ini Pak Hardi selaku kepala Desa Balai Belungai, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya program itu lumayan membantu para masyarakat yang ada dalam kelompok tani tersebut serta mereka berkecimpung di dalam pembibitan dan penanaman. Jadi kalau dulu begitu hujan mungkin mereka tidak punya pekerjaan selain ngaret. Sekarang mereka puji Tuhan bisa bertahanlah karena saya lihat beberapa tahun ini mereka kerja, jadi dengan penghasilan yang cukup lumayanlah diatas banyak orang kerja ngaretlah”. (Wawancara Pra Riset 08 September 2017)

Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang telah di lakukan oleh peneliti, maka diperoleh beberapa fakta berhubungan dengan program CSR yang di laksanakan oleh PT.ANTAM. Fakta yang pertama adalah bagi PT.ANTAM melaksanakan CSR sangatlah penting, karena hal tersebut sudah menjadi sangat penting dan komitmen bagi perusahaan mengelola dampak negatif dan dampak positif atas kebijakan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sehingga dibentuklah struktur kepengurusan dalam Divisi CSR, mulai dari Direktur sampai orang lapangan. Karena jika perusahaan tidak menganggap penting, perusahaan tidak akan bersusah payah untuk merekrut orang-orang yang berkompeten di bidang CSR. Karena jika seperti itu maka hanya akan menciptakan biaya bagi perusahaan. Fakta yang kedua adalah pada awal pelaksanaan CSR yang di lakukan oleh perusahaan adalah lebih kearah relasi dan pelayanan. Misalnya, memberi bantuan pelayanan, sumbangan gereja, sumbangan kesehatan, sumbangan masjid, acara 17 agustusan. Fakta yang ketiga adalah dalam perencanaan program untuk program apa saja yang sesuai untuk dilaksanakan oleh perusahaan, akan melibatkan tingkatan organisasi paling bawah di dalam suatu desa. Biasanya di rencanakan dari tingkat dusun, melalui musyawarah dusun. Setelah itu naik ke tingkat desa, melalui musyawarah desa. Baru setelah itu di ajukan ke perusahaan. Dalam pengajuan dan rapat di perusahaan, biasanya ada perwakilan perangkat desa yang turut serta dalam memilah program apa yang sesuai dengan daerahnya. Untuk program yang belum bisa langsung di realisasikan pada tahun yang bersangkutan, maka akan di

anggarkan pada tahun depan. Karena akan mendahulukan program yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

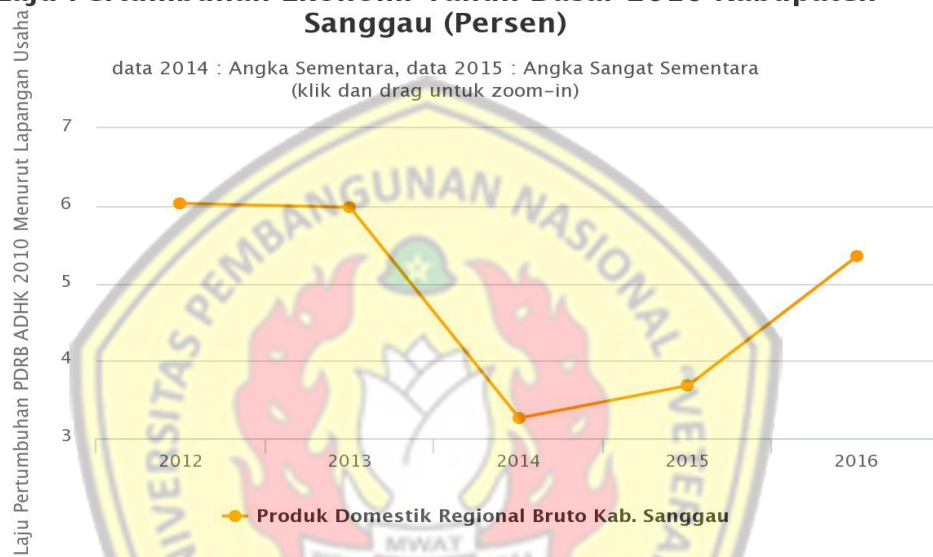
Fakta yang keempat adalah sebagai seorang tokoh masyarakat dan karyawan yang bekerja di perusahaan, Bapak Tereng tetap melaksanakan tugasnya dengan profesional. Sebagai seorang tokoh masyarakat dan juga karyawan di perusahaan, ternyata masih ada sebagian kecil yang beranggapan negatif terhadap beliau. Namun, mayoritas masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai suatu masalah. Hal tersebut dapat terlihat, jika masyarakat membutuhkan saran, bantuan serta mengajukan proposal ke perusahaan, maka orang yang pertama di cari adalah beliau. Fakta yang kelima adalah pembentukan kelompok tani yang ada di Dusun Natai Desa Balai Belungai. Pembentukan kelompok tani ini di dasari karena melihat bahwa sekitar 80% tanah masyarakat sudah di serahkan kepada perusahaan untuk pembebasan lahan. Sehingga banyak dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, sebagai seorang tokoh masyarakat Bapak Tereng mencari jalan bagaimana jika program yang akan di laksanakan oleh perusahaan dapat di laksanakan di Dusun Natai tersebut. Sehubungan dengan program yang akan di laksanakan sesuai dengan pekerjaan masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani. Fakta yang terakhir adalah tanggapan dari Kepala Desa Balai Belungai, Bapak Hardi. Beliau menyatakan bahwa dengan adanya program dari PT.ANTAM, masyarakat yang masuk ke dalam program binaan sudah lebih baik hidupnya daripada yang belum bergabung. Mulai dari tempat tinggal, sudah banyak yang direnovasi, untuk kendaraan sekarang sudah punya, termasuk kulkas.

Kepala Bappeda Sanggau mengatakan "*pertumbuhan ekonomi sanggau membaik*" (Kapas Post, 2017). Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh pembangunan di Kabupaten Sanggau yang ditinjau dari aspek ekonomi. Seperti yang ditargetkan dalam RKPD / RPJMD sebesar 5% atau lebih. Data sementara sudah mencapai 5% lebih pada tahun 2015-2017, jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 3,26% (Sanggaukab.bps.go.id). Hal ini mengingat APBD Sanggau rata-rata dari tahun 2014 hingga menuju 2018 ini berkisar antara Rp 1,2 – Rp 1,6 Triliun. Sementara investasi dari APBN keseluruhan yang ada di Sanggau kurang lebih Rp



1 – Rp 6 Triliun. Tentunya jika melihat investasi belanja pemerintah yang sebesar Rp 2,3 Triliun, kita menargetkan pertumbuhannya 5% tentu terkendala. Oleh karena itu masih membutuhkan pihak swasta dan pihak lainnya. Dikutip dari TribunPontianak.co.id, Sanggau 2017, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Sanggau Rahim menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sanggau yang naik, merupakan peningkatan ekonomi masyarakat yang sangat baik dan berarti tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat berimbang.

### Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun Dasar 2010 Kabupaten Sanggau (Persen)



Sumber: Sanggaukab.bps.go.id

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun dasar 2010 Kabupaten Sanggau dalam bentuk persentase.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa program CSR dalam mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT.ANTAM berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, karena saat ini program rancangan perusahaan dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan modal yang mereka peroleh dari upah saat mereka masih di bawah naungan perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozor & Nwankwo (2008) mengenai peran pemimpin lokal dalam pengembangan masyarakat. Penelitian Firdaus (2011) mengenai model kemitraan yang umumnya dilakukan adalah penyediaan infrastruktur, kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah untuk pengembangan SDM di daerah melalui implementasi CSR yang berbasis kapabilitas SDM saat ini

untuk kebutuhan yang akan datang, dan rencana pembangunan daerah tentang *skill knowledge ability* dari SDM daerah. Penelitian Turang dkk (2012) mengenai suatu model kerja bersama beberapa keluarga, kelompok-kelompok dan kelompok kerja kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tomohon. Penelitian Azra & Gustina (2012) mengenai tingkat keseriusan pihak perusahaan yang akan menerima efek luar biasa apabila program CSR murni dilakukan untuk sebuah perbaikan. Penelitian Dody & Hilarius (2012) mengenai peran korporasi dalam pengentasan kemiskinan namun yang memegang peran penuh dalam pelaksanaan adalah korporasi, sehingga masyarakat akan terus bergantung kepada korporasi. Penelitian Siska (2013) penelitian ini membahas bagaimana dampak industri batu bara dilihat dari sosial ekonominya. Penelitian Prayogo dkk (2013) mengenai pedoman bagi pelaksanaan dan penilaian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Serta penelitian Rusmawati (2013) mengenai peran *public communication* yang strategi penyaluran CSR disusun dari satu pihak KPC sendiri, sehingga ada beberapa ketidaksesuaian antara apa yang dibutuhkan pemda dan masyarakat.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu (*gap research*) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Balai Belungai Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau

## **I.2 Fokus Masalah**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Menurut Moleong (2010 hlm. 94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan tentang situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan strategi CSR oleh tim CSR perusahaan

Proses perencanaan strategi untuk program ini dilakukan oleh tim CSR yang telah dibentuk. Dalam proses perencanaan suatu program, dilakukan observasi langsung ke masyarakat ataupun melalui tokoh masyarakat, agar program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peran tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat di Desa Balai Belungai, saat ini juga menjabat sebagai staf CSR di PT.ANTAM UBP Bauksit. Sehingga informasi yang di perlukan oleh perusahaan bisa langsung diperoleh melalui si tokoh masyarakat tersebut.

3. Manfaat program CSR

Setelah program dilaksanakan, perusahaan harus melakukan evaluasi atas program tersebut. Evaluasi di lakukan untuk mengukur sejauh mana program yang telah terlaksana memberikan manfaat kepada masyarakat yang menerima program.

### **I.3 Perumusan Masalah**

Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR PT.ANTAM UBP BAUKSIT di Desa Balai Belungai Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program CSR PT. ANTAM UBP BAUKSIT di Desa Balai Belungai Kecamatan Toba.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperoleh pemahaman

mengenai penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam sebuah perusahaan sehingga menjadi pen jembatan teori dan praktek.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan menyimpulkan hubungan antara masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan dalam penerapan program CSR dalam bentuk peluang penciptaan kesempatan kerja, pendanaan usaha, pengembangan infrastruktur, keahlian melalui pelatihan keterampilan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini akan mencerminkan bahwa kehadiran CSR berkontribusi dalam bentuk dukungan pembiayaan terutama karena keterbatasan anggaran pemerintah, dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, dan lain-lain), serta dukungan keahlian (pengembangan kapasitas masyarakat).

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini akan berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan, karena dengan adanya implementasi dan strategi CSR yang baik oleh perusahaan merefleksikan kesadaran diri perusahaan terhadap lingkungan dalam berbagi kesejahteraan yang kemudian bisa menghasilkan nilai lebih seperti memperkuat "Brand" perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, menghasilkan inovasi, melebarkan akses sumber daya, serta peluang